

Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Industrialisasi Musik Pop Bali

I WAYAN ARDINI

Program Studi Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar, Indonesia.
E-mail: armd_2011@yahoo.co.id

Musik pop Bali mengalami industrialisasi sejak dasawarsa 1990-an ketika perkembangan teknologi, sistem ekonomi, dan budaya musik baru mendorong secara masif kelahiran studio-studio rekam, musisi-musisi, dan produk-produknya. Di tangan pemilik modal, muncul kapitalisme musik pop Bali. Di balik diskursus pelestarian budaya Bali melalui musik pop Bali, ideologi dan kepentingan bekerja untuk tujuan kapitalisasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang dua setengah dasawarsa ini, industrialisasi musik pop Bali berlangsung dalam bentuk produksi, distribusi, dan konsumsinya di wilayah Provinsi Bali akibat adanya jalinan kekuasaan budaya, kekuasaan kapital, dan kekuasaan media. Industrialisasi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah ideologi, yaitu kapitalisme, popisme, politik budaya lokal, dan kulturalisme, di mana kapitalisme menjadi ideologi dominan. Industrialisasi musik pop Bali menyebabkan terjadinya dampak tertentu. Dampak ekonomi terkait dengan nilai tukar; dampak sosial (nilai guna) terkait dengan nilai guna/manfaat; dampak budaya terkait dengan nilai identitas/otentisitas; dan dampak politik terkait dengan nilai pembangunanisme/developmentalisme.

Production, Distribution, and Consumption in Balinese Pop Music Industrialization

Balinese pop music has undergone industrialization since the decade of 1990's when the technological progress, economical system, and new musical culture massively drove to the born of recording studios, musicians, and and the products. In the hands of capital owners, Balinese pop music capitalism occurs. Behind the discourse of the preservation of Balinese culture through Balinese pop music, ideology and interests work for the purpose of capitalization. The result of the study shows that during the two and a half decades, the industrialization of Balinese pop music goes in the form of production, distribution, and consumption in the province of Bali due to the linked cultural power, the power of capital, and media power. Industrialization is influenced by a number of ideologies, capitalism, popisme, local political culture, and multiculturalism, in which capitalism became the dominant ideology. Bali pop music industrialization causes a certain impact. The economical impact related to exchange rates; social impact (use value) related to the value / benefits; cultural impact associated with the value of identity / authenticity; and political impacts associated with the value of developmentalism / developmentalism.

Keywords: Production, distribution, consumption, industrialization, Balinese pop music.

Masyarakat masa kini yang sedang mengalami globalisasi semakin lama semakin intens disuguhi musik pop (*pop music*), baik yang sengaja diputar untuk konsumsi pribadi maupun kebetulan didengar di radio, televisi, atau media lain, dan baik yang dinikmati secara mendalam maupun sambil lalu. Sebagian besarnya adalah remaja dan dewasa, termasuk perempuan dan ibu rumah tangga. Mereka tidak saja berasal dari perkotaan tetapi juga pelosok-pelosok desa. Musik pop, sebagai bagian penting dari budaya pop (*pop/popular culture*), memberikan hiburan dan mendatangkan kepuasan tersendiri bagi yang mengonsumsinya.

Sebagai bagian dari budaya global, musik pop tidak saja berkembang di negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, yang di era kapitalisme global merupakan negara pemimpin dunia di bidang budaya pop, tetapi dapat ditemui di berbagai negara. Di Indonesia musik pop dalam banyak hal bahkan merajai blantika musik setempat. Ketenaran musik pop Indonesia diawali sepak terjang kelompok Koes Plus pada tahun 1970-an. Grup band legendaris yang dibentuk pada tahun 1969 ini dapat dikategorikan sudah mengindustri dengan menciptakan ratusan lagu dan sangat disukai penggemarnya sampai saat ini.

Diperantarai media elektronik, khususnya radio dan televisi, musik pop sampai saat ini berkembang dengan pemain industri (dalam hal ini musisi, khususnya penyanyi dan kelompok band) yang relatif cepat pergantiannya (*temporer*) sebagai budaya pop, yang secara alamiah cepat muncul dan cepat hilang karena digantikan pemain yang lain. Dengan itu, musik pop tidak hanya bersifat global dan nasional melainkan lokal (*kedaerahan*) yang berkembang sesuai ragam masyarakat daerah yang ada. Untuk menyebut beberapa, saat ini terdapat musik pop daerah, seperti musik pop Batak dan Minang di Sumatera, musik pop Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, musik pop Sunda di Jawa Barat, dan musik pop Bali di Bali.

Sebagai suatu jenis musik pop daerah di wilayah Provinsi Bali, musik pop Bali menggunakan kekhasan budaya Bali yang membedakannya dengan seluruh jenis musik pop yang ada, baik musik pop daerah lain maupun musik pop Indonesia dan Barat. Ciri umum yang paling mencolok dari musik pop Bali adalah penggunaan syair berbahasa

daerah Bali. Pada tahap awal perkembangannya, selain syair berbahasa Bali, musik pop Bali menunjukkan ke-Bali-annya melalui notasi dengan tangga nada pentatonik berlaras *pelog-slendro* dan alat musik tradisional, seperti *gangsa*, *suling*, *kendang*, dan *cengceng*. Belakangan ini muncul percampuran musik pop Bali dengan berbagai elemen modern, seperti tangga nada diatonik dan alat musik modern yang canggih dan *computerized* dan bahkan terjadi kecenderungan semakin berkurangnya kekhasan budaya Bali.

Sejarah musik pop Bali dapat ditelusuri dari rekaman pertama yang tergolong sangat sukses yang dilakukan Band Putra Dewata pimpinan Anak Agung Made Cakra pada tahun 1970 dengan album/lagu "Kusir Dokar" yang mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1976. Pada dasawarsa 1980-an muncul modernisasi musik pop Bali lewat Yong Sagita dan beberapa musisi yang lain dengan adanya pergeseran ke tema ringan (kritik sosial dan kadang-kadang porno) dengan garapan musikalitas yang mulai beralih ke tangga nada diatonik seperti halnya musik pop Barat dan Indonesia. Musik pop Bali baru benar-benar mengalami industrialisasi pada dasawarsa 1990-an yang diawali dengan popularitas penyanyi Widi Widiana (tahun 1993) dengan nuansa Mandarinnya yang diikuti banyaknya musisi yang bermunculan silih-berganti. Pada dasawarsa 2000-an, pencapaian berikutnya terjadi karena kemunculan televisi swasta lokal pertama, yaitu Bali TV. Beberapa musisi individual dan kelompok yang dapat disebut sebagai bintang musik pop Bali dasawarsa 2000-an adalah Dek Ulik, Bayu KW, Raka Sidan, Lolot, dan [XXX]. Pada paruh pertama dasawarsa 2010-an ini, Krisna Purpa dengan KIS Band-nya tergolong sangat populer, khususnya di kalangan anak muda Bali.

Secara politik, di era reformasi (terhitung sejak 1998), bidang musik, termasuk musik pop Bali, semakin mendapat tempat dengan pencanangan 2009 sebagai Tahun Indonesia Kreatif dan bahkan ekonomi kreatif saat ini dilegitimasi dengan keberadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Kegiatan ekonomi kreatif memasukkan musik sebagai salah satu dari 15 unsurnya di mana musik dijelaskan sebagai kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, distribusi, dan ritel rekaman suara, hak cipta rekaman, promosi

musik, penulis lirik, pencipta musik/lagu, pertunjukan musik, penyanyi, dan komposisi musik.

Sebagai persoalan yang banyak berkulat di ranah ekonomi dengan segala implikasi ekonomi, sosial, budaya, dan politiknya, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industrialisasi musik pop Bali secara *common sense* seperti tanpa masalah karena di permukaan tampak diterima begitu saja (*given*) oleh masyarakat. Seolah-olah proses produksi, distribusi, dan konsumsi tersebut hanya menyangkut hubungan sederhana antara musisi (penyanyi/pencipta lagu/pemain musik) dan masyarakat konsumen (penikmat)-nya saja, padahal selain musisi sebagai sumber daya budaya (artistik), yang tidak kalah pentingnya terdapat sumber daya modal dan sumber daya media. Sumber daya modal melibatkan pemilik kapital, yakni produser musik pop Bali yang dengan kapitalnya memproduksi CD, kaset, video klip, pertunjukan, dan sebagainya, sedangkan sumber daya media yang mendukung proses distribusi menyangkut jaringan media pemasar (terutama audio-visual, khususnya televisi) yang mengomunikasikan, menyosialisasikan, memromosikan atau memasarkan dan melakukan seduksi (bujuk rayu) produk-produk tersebut kepada masyarakat.

Tentu saja sebagai aktivitas bisnis berskala besar dan melibatkan banyak pihak, industrialisasi musik pop Bali dikuasai secara dominan oleh kapitalisme. Dengan kepentingan pembesaran keuntungannya, pemilik kapital dalam industri musik pop Bali berhasil menghaluskan gerakan ekonomi modernnya sedemikian rupa dengan memadukan secara elegan ideologi-ideologi lain tersebut, sehingga seolah-olah industrialisasi musik pop Bali hanya untuk kepentingan pelestarian dan pengembangan seni-budaya Bali atau hanya merupakan kebutuhan masyarakat Bali padahal ia lebih merupakan kebutuhan kapitalisme untuk mencari keuntungan ekonominya. Bahkan dalam proses produksi sendiri, produser musik pop Bali menempati kekuasaan tertinggi yang menyebabkannya menjadi pemegang kontrol atas sistem bagi hasil dengan para musisi (pencipta lagu, penyanyi, pemain musik).

Sebagai dampak industrialisasi musik pop Bali, tidak terelakkan terjadi perebutan ruang makna di antara pelaku industri (produser sebagai pemilik

modal) dan musisi (pencipta lagu, penyanyi, pemain musik, dan sebagainya), konsumen, masyarakat Bali umumnya, dan pemerintah terkait. Di antara mereka berlangsung pergulatan secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik di satu sisi, di samping di sisi lain berlangsung kontestasi internal antarproduser, antarmusisi, antarsaluran distribusi, antarmedia, dan sebagainya, sebagai bagian dari sistem kapitalisme musik pop Bali. Karena peta-peta makna dalam industrialisasi musik pop Bali bersifat plural dan kompleks serta diperebutkan banyak pihak, masing-masing pihak tersebut dalam artikulasinya akan melibatkan praktik-praktik pergulatan yang berbeda-beda dalam memproduksi makna.

Pertautan budaya, ekonomi, dan politik (masyarakat, industri terkait, dan pemerintah) bidang musik pop Bali yang di dalamnya berlangsung jalinan sumber daya budaya, kapital, dan media yang digambarkan sebelumnya menunjukkan pentingnya produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industrialisasi musik pop Bali diteliti dalam bentuk penelitian kajian budaya. Dengan berkembangnya globalisasi di segala bidang kehidupan melalui sasaran subjek dan objek penelitian yang relatif kompleks dalam industrialisasi musik pop Bali sebagaimana telah digambarkan, penelitian ini dirancang bermetode kualitatif.

Beberapa teori digunakan secara eklektik dalam penelitian ini. *Pertama*, Teori Musik Pop (Theodor Adorno dalam C. Teguh Budiarto, *Musik Moderen dan Ideologi Pasar*, 2001) berpendapat, sekali suatu pola musik atau lirik berhasil dibuat maka ia akan dieksploitasi untuk tujuan komersial. Untuk menutupi standardisasi, industri musik melakukan "individualisasi semu". Di samping itu, musik pop menciptakan pendengar pasif dan berlaku sebagai perekat sosial.

Kedua, menurut Teori Budaya Pop (John Storey, dalam *Teori Budaya dan Budaya Populer: Memetakan Lanskap Cultural Studies*, 2004: 10-25), budaya pop berciri disukai orang; jenis kerja rendah; untuk menyenangkan orang; dan dibuat untuk diri sendiri (masyarakat); merupakan budaya sisa (residu); ditetapkan sebagai "budaya massa"; berasal dari "rakyat"; mengandung hegemoni; dan merupakan pemikiran postmodernisme yang menentang perbedaan antara budaya tinggi dan budaya pop.

Ketiga, dalam Teori Relasi Kekuasaan/Pengetahuan (Michael Foucault, dalam *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, 1977: 27-28) ditunjukkan bahwa kekuasaan dengan kepentingan-kepentingan yang dimilikinya menciptakan pengetahuan dan ideologi. Di balik pengetahuan dan ideologi, selalu terdapat kekuasaan.

Keempat, Teori Praktik (Pierre Bourdieu, dalam bukunya *Outline of a Theory of Practice*, 1977) meyakini, subjek atau masyarakat (sebagai agensi/"bawah") terlibat aktif dalam bernegosiasi dengan struktur objektif ("atas") dalam rangka mengonstruksi kebudayaannya. Kebudayaan berproses melalui habitus karena merupakan arena/ranah perjuangan tempat pergulatan kekuasaan berdasarkan modal/kapital (budaya, ekonomi, simbolik) yang dimiliki.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan berikut. *Pertama*, bagaimana bentuk produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industrialisasi musik pop Bali di wilayah Provinsi Bali? *Kedua*, faktor-faktor apa yang memengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industrialisasi musik pop Bali di wilayah Provinsi Bali? *Ketiga*, bagaimana dampak produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industrialisasi musik pop Bali di wilayah Provinsi Bali secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik?

Penelitian produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industrialisasi musik pop Bali ini dilakukan di wilayah Provinsi Bali yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Bali dan beragama Hindu. Penelitian ini difokuskan di tempat-tempat berlangsungnya produksi, distribusi, dan konsumsi musik pop Bali di seluruh kabupaten/kota yang ada. Provinsi Bali sendiri mencakup delapan kabupaten, yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng, dengan satu kota, yaitu Denpasar, sebagai ibukotanya.

Data penelitian ini meliputi jenis data kualitatif, yakni narasi, uraian, kata, dan ungkapan dalam industrialisasi musik pop Bali. Data dimaksud mencakup bentuk, faktor-faktor yang memengaruhi, dan dampak produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industrialisasi musik pop Bali. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung yang berasal

dari hasil wawancara dari sejumlah informan dan dari hasil observasi di lapangan penelitian.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian terkait, seperti musisi (pencipta lagu, *arranger*, penyanyi, pemain musik), produser/pemilik modal (studio rekam), pemilik toko/lapak musik, media massa, konsumen, dan tokoh masyarakat. Observasi dilakukan di tempat berlangsungnya produksi, distribusi, dan konsumsi musik pop Bali. Data sekunder didapatkan dari sejumlah kantor dan lembaga, seperti kantor statistik, perpustakaan media massa, kantor organisasi musisi, dan arsip-arsip studio/musisi yang diproses dan diolah berdasarkan keperluan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan anjuran Miles dan Huberman (1992: 15-19) berikut. *Pertama*, reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. *Kedua*, penyajian data, yaitu merangkai dan menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif, dan mudah dipahami. Penyajian data menggunakan bentuk teks naratif yang dilengkapi dengan jaringan kerja yang berkaitan, sehingga semua informasi yang disusun mudah dilihat dan dimengerti. *Terakhir*, penarikan simpulan, yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan, yakni dengan maksud menguji kebenaran, kecocokan, dan validitas makna-makna yang muncul di lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan yang kuat, simpulannya meningkat menjadi lebih rinci dan menjadi simpulan akhir yang utuh.

PEMBAHASAN

Musik pop adalah salah satu genre musik dunia yang sudah sedemikian lama dikenal dalam sejarah permusikan. Secara umum musik pop digambarkan sebagai musik ringan (*easy listening*) yang menyenangkan dan disukai begitu banyak peminat dengan menekankan pada sifat hiburan. Sebagai

budaya pop, musik pop dinikmati karena keentengan liriknya, tema yang dipilih, ekspresi instrumentasi musikal yang mengiringi, sampai cara permainannya. Unsur-unsur instrumen modern, terutama *keyboard*, gitar, dan drum melengkapi sajian jenis musik ini. Menurut Mack (1995: 18-19), musik pop merupakan musik *entertaining* bercirikan bahasa (teks) dengan gambaran yang kuat secara emosional, frase-frase melodis yang mudah dipahami (di-sekuens-kan terus-menerus), dan instrumentasi yang bombastis dengan alat gesek, paduan suara sebagai latar belakang.

Senada dengan Mack (1995), yang dimaksud dengan musik pop dalam penelitian ini berbeda dengan musik yang populer. Musik pop adalah salah satu bentuk musik yang populer. Di Barat, musik yang populer mencakup jazz, rock, country, dan sebagainya, selain musik pop itu sendiri. Di Indonesia, selain musik pop, musik yang populer mencakup dangdut. Dalam tulisan Usman (2000), musik populer mencakup (1) lagu pop daerah, (2) pop Indonesia, dan (3) irama Melayu/Ndang-dut.

Musik pop Bali adalah musik pop yang bersumberkan kekhasan Bali dalam karyanya, terutama menggunakan syair berbahasa Bali, notasi yang dipakai bertangga nada pentatonik dengan laras *pelog-slendro* (khususnya jenis musik pop Bali dalam tahap awalnya) sebagai pengaruh sistem musik tradisional Bali, dengan iringan musik modern (seperti gitar, drum, *keyboard*) yang dikolaborasi dengan alat musik tradisional, serta dalam tampilan panggung yang menggunakan ikon-ikon kebalian, seperti busana, cara berkomunikasi, koreografi, dan tata panggung (dekorasi).

Dengan berorientasi pasar, musik pop Bali masa kini mengalami perkembangan dan perubahan yang relatif cepat. Bahkan ada produk-produk yang elemen-elemen budaya Balinya digeser elemen-elemen budaya Barat modern, seperti alat musik, notasi, sampai syair/lirik bahasa Bali yang mengalami percampuran. Musik pop Bali saat ini eksis dalam berbagai nuansa, seperti Mandarin, Banyuwangi, Jawa Tengah, Sunda, dan sebagainya dan bermacam-macam genre, seperti pop biasa, pop kreatif, pop alternatif, dan sebagainya.

Musik pop Bali kini mengalami industrialisasi dengan berdirinya berbagai pilar industri terkait.

Kata *industri* dan *industrialisasi* sangat berkaitan dalam penelitian ini baik secara eksplisit maupun implisit. Dilihat dari konsepnya, industri berbeda dengan industrialisasi meskipun kata *industrialisasi* berasal dari akar kata *industri*. Industri mengacu pada lembaga (perusahaan) pelaku industrialisasi sedangkan industrialisasi merupakan proses kegiatan yang dilakukan industri tersebut, yaitu produksi dan distribusi yang memengaruhi konsumsi dan, sebaliknya, konsumsi dan pasar (konsumen) pun potensial memengaruhi produksi dan distribusi.

Industri musik, termasuk industri musik pop, yang terdiri atas para pemilik studio rekaman dan *production house*, pencipta musik/lagu, penyanyi, pengiring musik, *event organizer*, media (radio, televisi, media cetak), atau pemilik toko kaset (*cassette*) dan *compact disc* (CD), tergolong industri budaya (*cultural industry*). Industri budaya adalah industri yang bergerak di bidang (ke)budaya(an). Industri budaya, dalam hal ini industri musik pop Bali, tidak terlepas dari masyarakat di mana kebudayaan tersebut berada. Karena industri budaya melibatkan masyarakat sebagai pemilik, pelaku, dan penerus kebudayaan sejak tahap produksi dalam proses industrialisasinya (yaitu, masyarakat sebagai subjek), industri tersebut merupakan bentuk postindustri dan postkapitalisme.

Industrialisasi musik pop Bali dapat dilihat dari fakta berkembangnya musik pop daerah Bali menjadi suatu industri bisnis yang menguntungkan, yang melibatkan berbagai aktivitas masif produksi dan distribusi musik pop Bali itu sendiri di satu sisi dan konsumsi masyarakat terhadapnya di sisi lain. Industrialisasi musik pop Bali adalah proses dan cara kerja seluruh lembaga, pihak, dan entitas yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling memengaruhi satu sama lain tersebut.

Bentuk Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Industrialisasi Musik Pop Bali

Industrialisasi musik pop Bali, sesuai pandangan Frith (1988; 2006), dimungkinkan oleh adanya perkembangan teknologi, sistem ekonomi, dan budaya musik baru dalam masyarakat. Sejak dasawarsa 1990-an sampai saat ini industrialisasi tersebut, sebagai bagian dari bisnis budaya pop di wilayah Provinsi Bali, berbentuk produksi, distribusi, konsumsi secara masif. Produksi dalam industrialisasi musik pop Bali diciptakan kekuasaan

Faktor-faktor yang Memengaruhi Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Industrialisasi Musik Pop Bali

Produksi, distribusi, dan konsumsi musik pop Bali yang dihasilkan jalinan kekuasaan budaya, kapital, dan media, dipengaruhi oleh keberadaan berbagai ideologi dan kepentingan. Dengan kepentingan yang dimilikinya, kapitalisme sebagai ideologi penguasa menciptakan pengetahuan dan makna yang menghegemoni masyarakat. Menurut Foucault (1977: 27-28), kekuasaan dan pengetahuan tidak terpisahkan.

Kapitalisme merupakan ideologi dominan dalam industrialisasi musik pop Bali. Sebagai benda budaya pop komersial, musik pop Bali dimanfaatkan untuk kepentingan memperoleh keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Logika pasar (*market*) dikenakan di mana masyarakat Bali adalah pasar produk tersebut (sebagai objek konsumsi) padahal mereka adalah sumber (asal muasal) musik pop Bali. Produk-produk tersebut pun relatif mudah menghegemoninya.

Kehebatan kapitalisme musik pop Bali di tangan kekuasaan kapital adalah kemampuannya untuk meramu dan merekayasa pengetahuan-pengetahuan di sekitar industrialisasi tersebut sehingga ideologi-ideologi lainnya, yakni popisme, politik budaya lokal, dan kulturalisme, mampu dikontrolnya. Dengan itu, seolah-olah musik pop Bali adalah kebutuhan masyarakat Bali dan untuk tujuan pengembangan seni-budaya Bali padahal sebenarnya lebih demi keuntungan kapital mereka.

Popisme (*popism*) terkait dengan musik pop Bali itu sendiri sebagai benda budaya pop. Karenanya, ia terkait dengan estetisasi produk, gaya hidup musisi, dan fetisisme komoditas di kalangan masyarakat konsumennya. Popisme musik pop Bali adalah bagaimana produk-produk musik pop Bali, sekaligus musisi, dan para pencintanya larut dalam perayaan serba pop ("pokoknya pop"). Ideologi ini dimanfaatkan dan terkait dengan kapitalisme.

Politik budaya lokal (*politics of local culture*) atau balinisasi (*baliseering*) dalam industrialisasi musik pop Bali berhubungan dengan politik identitas (*politics of identity*) keetnikan Bali. Masyarakat dan kebudayaan Bali secara ideal-normatif adalah sumber dan inspirasi musik pop Bali. Salah satu

penanda penting politik tersebut adalah bahasa Bali. Orang Bali adalah konsumen/penikmat musik pop Bali itu sendiri. Politik budaya lokal Bali saat ini di Bali dikenal dengan ajeg Bali. Ajeg Bali adalah gerakan moral dan budaya yang dipelopori dan digalang Kelompok Media Bali Post (Bali Post dan Bali TV) sejak tahun 2002 untuk membangun keswadayaan masyarakat Bali yang didasari budaya Bali dan agama Hindu. Ajeg Bali mendapatkan momennya dengan sempat terjadinya bom Bali pada tahun 2002 (dan kemudian 2005). Bali TV sebagai media audio-visual berperan sangat besar dalam perkembangan industrialisasi musik pop Bali, khususnya sejak 2002.

Kulturalisme (*culturalism*) mengacu pada praktik perayaan kehidupan atau kebudayaan sehari-hari (nyata) masyarakat. Ideologi ini merupakan warisan dari para kelompok penggagas *cultural studies* di Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), University of Birmingham, Inggris.

Kulturalisme musik pop Bali mencakup tema kehidupan manusia Bali kontemporer. Musik pop Bali gaya Raka Sidan ("Song Brerong", "Guide Sing Maan Susuk", "Nyama Peturu Bali") atau Dek Ulik ("Somahe Bebotoh", "Baju Anyar") di antaranya menunjukkan hal ini. Selain itu, tema cinta dan persoalan hubungan suami-istri cukup mendominasi meskipun ia dapat tergolong kulturalisme atau bahkan kulturalisme semu (khayalan belaka). Hubungan suami-istri merupakan tema yang menarik.

Ada empat ideologi dengan kepentingannya masing-masing yang memengaruhi industrialisasi musik pop Bali, yaitu kapitalisme, popisme, politik budaya lokal, dan kulturalisme. Di satu sisi, seluruh ideologi tersebut bekerja bersama tetapi di sisi lain terlihat ada pengutamakan per satuan lagu/albumnya.

Kapitalisme dengan kecanggihannya sering tidak tampak di permukaan. Seolah-olah musik pop Bali adalah untuk kepentingan pengembangan dan pelestarian seni-budaya Bali dan bukan sebagai arena perjuangan mencari keuntungan ekonomi.

Dampak Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Industrialisasi Musik Pop Bali secara Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Politik

budaya (musisi) dan kekuasaan kapital (pemilik modal). Musisi memberikan *input* (musikal) dan pemilik modal (produser/pemilik studio rekam) memrosesnya untuk menjadi *output* (produk) musik pop Bali. Widi Widiana, Lolot, [XXX], Bayu KW, Agung Wirasutha, Dek Ulik, Raka Sidan, Krisna Purpa, dan KIS Band menjadi artis-artis bintang.

Teknologi produksi musik pop Bali berkembang dari sistem analog ke digital. Dengan itu, muncul produk berupa kaset dan teknologi *compact disc* (CD) mulai dikenal (dasawarsa 1990-an), di samping VCD/DVD (dasawarsa 2000-an), dan *ringback tone* (RBT), *bluetooth*, dan *internet (online/daring)* (dasawarsa 2010-an).

Selain biasa/konvensional, musik pop Bali kreatif berkembang tetapi elemen-elemen kebalikannya berkurang dalam tangga nada, bahasa lirik/syair, cara penyajian musik, gaya penampilan musisi, dan alat musiknya. Irama (*genre*)-nya meluas dan nuansanya pun bervariasi. Pembajakan meluas yang menyebabkan terjadinya dinamika dalam industrialisasi itu sendiri.

Meskipun dikreasikan menjadi nuansa-nuansa dan/atau genre-genre berbeda-beda (bercampur-campur aliran musik lain) hal ini, sesuai Teori Musik Pop Adorno dalam Budiarto, 2001), merupakan sebuah standarisasi yang pembedaannya tersebut merupakan individualisasi semu demi tetap lakunya produk-produk yang ditawarkan.

Produser/pemilik studio rekam sebagai pusat kekuasaan melakukan fungsi distribusi produk-produk musik pop Bali. Distribusi konvensional musik pop Bali dilakukan dengan cara distribusi langsung di mana produser/pemilik studio rekam menjual langsung kepada pembeli dan calon pembeli. Distribusi tidak langsung dilakukannya melalui kerja sama dengan toko-toko, *outlet-outlet*, dan lapak-lapak musik.

Distribusi yang paling umum, yang menjadi kecenderungan gaya pemasaran musikal saat ini, dilakukan dengan dukungan kekuasaan media, khususnya media elektronik, yakni radio (dasawarsa 1990-an dan bahkan sebelumnya) dan televisi (dasawarsa 2000-an). Radio dan terutama televisi mempromosikan, menyosialisasikan, dan bahkan menseduksi (membujuk rayu) produk-

produk terkait.

Bali TV (berdiri tahun 2002) berperan besar dalam industrialisasi musik pop Bali. Bali TV menjadi simbol pengembangan dan pelestarian seni-budaya Bali, termasuk musik pop Bali, lebih-lebih kehadirannya terkait dengan ajeg Bali yang secara kebetulan hampir bersamaan dengan kehadiran era desentralisasi melalui otonomi daerah. Berkat Bali TV, musik pop Bali demikian digandrungi.

Meskipun ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalamnya, musik pop Bali tetap menjadi produk budaya dari, oleh, dan untuk masyarakat Bali sebagaimana dikatakan Storey (2004) dalam Teori Budaya Popnya.

Produksi dan distribusi musik pop Bali yang berlangsung memungkinkan berlangsungnya konsumsi secara masif dalam masyarakat Bali. Produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industrialisasi musik pop Bali saling memengaruhi. Kenyataannya, konsumsi musik pop Bali pun mendorong terjadinya produksi dan distribusi karena pemilik modal, dengan naluri bisnisnya, bekerja demi (kebutuhan dan keinginan) pasar (*market*).

Industrialisasi musik pop Bali melalui upaya standarisasi (sebagaimana dikritisi Adorno dalam Teori Musik Popnya) mampu menciptakan banyak konsumen, termasuk konsumen pasif, di mana musik menjadi perekat sosial di antara mereka. Dalam kategorisasi Stuart Hall (Storey, 2006: 14), konsumen pasif adalah pendengar terhegemoni/terdominasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa selain konsumen pasif, terdapat konsumen aktif, yang dalam kategorisasi Hall merupakan pendengar ternegosiasi dan pendengar oposisional. Pendengar oposisional tergolong pendengar ahli yang jumlahnya terbatas.

Konsumen musik pop Bali kebanyakan berasal dari kelompok sosial-ekonomi menengah ke bawah. Status tersebut memengaruhi cara mereka membeli, mengonsumsi, dan menikmati musik pop Bali. Dengan belum tertanganinya pembajakan secara tuntas, mereka memilih membeli produk-produk terkait secara sembarangan (bajakan) daripada yang asli yang harganya relatif jauh lebih mahal.

Musik pop Bali dalam adalah paduan dan saling silang antara kebudayaan dari atas (pemerintah, sistem kebudayaan, dan sistem ekonomi/industri) dan kebudayaan dari bawah (musisi sebagai bagian dari masyarakat, konsumen yang juga bagian dari masyarakat, dan masyarakat itu sendiri). Konstruksi ini sejalan dengan pandangan Teori Praktik Bourdieu (1977).

Musik pop Bali secara dominan sejatinya merupakan praktik bisnis. Sebagai praktik bisnis, dampak ekonomi sendiri dipergulatkan untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi (nilai tukar). Pergulatan ini melibatkan produser/pemilik studio rekam, dan termasuk musisi yang bekerja untuk mereka, dalam interaksinya dengan berbagai pihak lain. Industrialisasi musik pop Bali, sesuai pandangan Teori Praktik sendiri, menjadi habitus perjuangan mereka masing-masing, dengan modal-modal yang dimilikinya, melalui ranah atau ruang pergulatan makna bersama. Pergulatan ekonomi dalam industrialisasi musik pop Bali lebih merupakan pertarungan modal ekonomi. Hanya, musisi pop Bali yang seluruhnya merupakan orang Bali memperoleh ketidak-adilan dalam sistem bagi hasil. Hal ini bukan gejala khas musik pop Bali tetapi juga musik pop Indonesia dan Barat dan bahkan bisnis di luar musik.

Saat musik pop Bali berada di tangan konsumen (masyarakat), ia memberikan efek tertentu, khususnya implikasi estetika. Dampak sosial ini dipergulatkan untuk tujuan mendapatkan kepuasan estetika (nilai guna/manfaat) di mana konsumen/penikmat berupaya melakukannya dalam interaksinya dengan para pelaku industrialisasi musik pop Bali, baik secara langsung maupun tidak langsung dan baik disadari maupun tidak disadari. Pergulatan estetika terjadi dari adanya struktur kesepadan parsial. Bila pemilik modal dan musisi memperoleh kepuasan ekonomi, sebagai gantinya, konsumen mendapatkan kepuasan estetika.

Tidak semua anggota masyarakat Bali adalah konsumen musik pop Bali. Orang Bali yang bukan tergolong konsumen tersebut setidaknya memperoleh dampak budaya. Meskipun tidak membeli, mengonsumsi, atau menikmati musik pop Bali, musik pop Bali tetap merupakan bagian dari seni-budaya (kebudayaan) Bali milik mereka.

Musik pop Bali adalah salah satu identitas kebalian. Karenanya, dampak budaya musik tersebut dipergulatkan untuk tujuan mencari nilai identitas/otentisitas. Yang terjadi adalah ironi tersendiri mengingat masyarakat Bali dan kebudayaannya adalah sumber (asal muasal) musik pop Bali sedangkan pihak yang dominan dalam industrialisasi tersebut adalah kekuasaan kapital.

Dampak politik dipergulatkan untuk tujuan mencapai nilai pembangunanisme/developmentalisme di mana pemerintah, khususnya pemerintahan di Bali (provinsi dan kabupaten/kota) yang meskipun aktivitasnya tidak tampak di permukaan merasa ikut berjuang menjalankan perannya. Keberhasilan industrialisasi musik pop Bali hampir selalu dianggap buah kebijakan politik pejabat publik di pemerintahan. Dilihat secara kritis, peran pemerintah dalam industrialisasi musik pop Bali agak kabur. Tampak sangat jarang keterlibatan pemerintah musik pop Bali sebagai produk bisnis padahal mereka menarik penghasilan (pajak/retribusi) dari setiap produk musik pop Bali yang dijual. Buktinya, pemerintah tidak mampu berbuat apa-apa dalam persoalan pemberantasan pembajakan. Mereka seakan-akan tidak memiliki kemauan politik (*political will*) untuk melakukannya padahal peraturan perundang-undangannya sangat mendukung (saat ini, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Bahkan pemerintah Bali (provinsi apalagi kabupaten/kota) tidak pernah mengadakan lomba-lomba dan penghargaan khusus, seperti pemberian *award* terkait. Musik pop Bali seolah-olah tetap menjadi arena unjuk bagi kalangan swasta (bukan negeri/pemerintah).

Dalam konteks politik praktis, belakangan musik pop Bali dijadikan komoditas untuk menarik minat masyarakat memilih pemimpin dan partai tertentu dalam pemilihan umum (Pemilu).

SIMPULAN

Musik pop Bali, dalam konteks industrialisasinya, berlangsung sejak dasawarsa 1990-an ketika terjadi produksi, distribusi, dan konsumsi yang masif di Bali akibat terjadinya perkembangan teknologi, ekonomi, dan budaya baru permusikan. Kekuasaan budaya (musisi/estetik-musikal) dan kekuasaan kapital (produser/pemilik studio rekam) bekerja untuk konteks produksinya. Di tangan kapitalisme,

musik pop Bali adalah komoditas komersial tempat mencari kehidupan bagi berbagai pihak terkait. Hanya, musisi sendiri lebih berada di pihak yang kalah dalam sistem bagi hasil sedangkan masyarakat konsumen menjadi objek konsumsi padahal mereka adalah pemilik/pelaku kebudayaan darimana jenis musik tersebut berasal. Diawali Widi Widiana yang bertindak sebagai pembuka jalan dan bahkan ikon, artis-artis bintang musik pop Bali diisi Lolot, [XXX], Bayu KW, Agung Wirasutha, Dek Ulik, Raka Sidan, Krisna Purpa, dan KIS Band. Terciptalah berbagai produk musik pop Bali, baik rekaman maupun pertunjukan dan yang lainnya, yang intinya merupakan suatu standarisasi tersendiri. Untuk distribusinya, pemilik modal bekerja sama dengan media, khususnya media, terutama audio-visual (televisi). Musik pop Bali pun semakin digandrungi masyarakat. Muncullah terutama konsumen pasif di samping jenis-jenis pasar lainnya. Pada akhirnya, konsumsi pun memengaruhi produksi dan distribusi musik pop Bali. Akibatnya, terjadi konsumsi terus-menerus yang menguntungkan pemilik modal.

Jelas bahwa kapitalisme, dengan kepentingan pencarian keuntungan ekonominya, merupakan ideologi dominan dalam industrialisasi musik pop Bali. Terdapat juga ideologi popisme, politik budaya lokal, dan kulturalisme secara bersama-sama di dalamnya. Kehebatan kapitalisme adalah kemampuannya meramu sedemikian rupa sehingga musik pop Bali seolah-olah bukan terutama untuk kepentingan kapital tetapi untuk pengembangan dan pelestarian seni-budaya Bali.

Industrialisasi musik pop Bali menyebabkan terjadinya dampak tertentu bagi seluruh pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam industrialisasi tersebut. Dampak ekonomi untuk kepentingan nilai tukar (*exchange value*); dampak sosial untuk kepentingan nilai guna/manfaat (*use value*); dampak budaya untuk kepentingan nilai identitas/otentisitas keetnik dan kelokalan Bali, yang disebut juga politik identitas dan politik etnik; dan dampak politik untuk kepentingan nilai pembangunanisme (*developmentalism*). Hubungan antarkepentingan (dan para pelakunya) tersebut berubah-ubah sesuai situasi.

Di atas itu semua, kebaikan musik pop Bali dalam konteks industrialisasi adalah keberadaannya seba-

gai kapitalisme postmodern yang mengandalkan keberadaan masyarakat dan kebudayaan Bali.

Beberapa saran terkait penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, pemerintah, khususnya pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) harus semakin terlibat secara nyata dalam seluruh proses industrialisasi musik pop Bali, lebih-lebih yang menyangkut praktik-praktik pembajakan. Hukum harus ditegakkan secara adil agar musisi bisa hidup sebagaimana seharusnya apalagi sudah ada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kedua, pemilik modal (produser/pemilik studio rekam) selayaknya lebih mempertimbangkan azas keadilan, baik dalam penentuan produksi musik pop Bali maupun dalam sistem bagi hasil dengan pihak musisi (pencipta lagu, arranger, penyanyi, pencipta lagu, dan sebagainya) yang dipekerjakannya. Dengan begitu, industrialisasi tidak semakin kapitalistis atau lebih menguntungkan pihak pemilik modal semata dan, di sisi lain, musik pop Bali sebagai bagian dari budaya pop di Bali semakin banyak mendayagunakan masyarakat Bali dalam arti yang sebenarnya.

Ketiga, musisi yang terlibat dalam industrialisasi musik pop Bali sebaiknya semakin banyak mempelajari seluk beluk dunia industri dan industrialisasi permusikan dan tidak lupa mengeksplorasi kebudayaan Bali sendiri. Maksudnya agar musisi tersebut mampu memanfaatkan industrialisasi yang ada secara menguntungkan bagi dirinya di samping, di sisi lain, agar produk-produk yang dimunculkan lebih menunjukkan kebalihannya.

Keempat, masyarakat Bali, baik selaku konsumen musik pop Bali maupun sebagai penikmat yang tidak membeli secara langsung agar lebih menyadari keberadaan dirinya sebagai objek konsumsi. Di samping itu, mereka seharusnya lebih selektif dalam memilih produk-produk yang sesuai untuk dirinya. Ilmuwan, budayawan, seniman, dan lembaga-lembaga terkait, di antaranya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, harus intens memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran mengonsumsi musik pop Bali secara cerdas.

DAFTAR RUJUKAN

Bourdieu, Pierre. (1977), *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press, Cambridge.

Budiarto, C. Teguh. (2001), *Musik Moderen dan Ideologi Pasar*. Tarawang Press, Yogyakarta.

Foucault, Michel. (1977), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (terjemahan). Vintage Books, New York.

Frith, Simon. (1988), *Music for Pleasure*. Routledge, New York.

_____. (2006), "The Industrialization of Popular Music" dalam Andy Bennet, Barry Shank, dan Jason Toynbee (ed.) *The Popular Music Studies Reader*. Routledge, London.

Mack, Dieter. (1995), *Apresiasi Musik: Musik Populer*. Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta.

Miles, Matthew B. dan Michael A. Huberman. (1992), *Analisis Data Kualitatif* (terjemahan). UII Press, Jakarta:.

Storey, John. (2004), *Teori Budaya dan Budaya Populer: Memetakan Lanskap Cultural Studies* (terjemahan). CV. Qalam, Yogyakarta.

_____. (2006), *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop: Pengantar Komprehensif Teori dan Metode* (terjemahan). Jalasutra, Yogyakarta:.

Usman, Sunyoto. (2000), "Apresiasi Masyarakat Yogyakarta terhadap Musik Populer" dalam Heddy Shri Ahimsa Putra (ed.) *Ketika Orang Jawa Nyeni*, hal. 153-214. Galang Press, Yogyakarta.